

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS KERJA

2.1. Tinjauan Pustaka.

2.1.1 Definisi Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian dkk, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuantujuan tersebut.

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya “Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen bahwa:

“Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan” (Syamsi,I, 1988:2).

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Perbedaan dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 2005:156). Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat dicapai. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Menurut Mahmudi definisi mengenai “efektivitas yaitu hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. (Mahmudi, 2005:92)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasannya suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila terjadi hubungan antara tujuan dari

program tersebut dengan hasil atau keluaran yang ingin dicapai. Suatu program yang efektif dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari hasil terhadap tujuan yang dicapai maka semakin efektif pula suatu organisasi atau kegiatan tersebut.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. (Kurniawan, 2005:109)

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian dari pada efektivitas ialah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran agar tujuan yang inginkan suatu organisasi atau instansi dapat tercapai dengan baik. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya dapat diterima oleh masyarakat sekitar.

Pengertian efektivitas menurut Supriyono. dalam bukunya yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen mengatakan bahwa : ”Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.(Supriyono, 2000:29)

Menurut Bernard mengatakan efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya,
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaikk dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. (Bernard, 1938:20)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaniingrat S, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa efektivitas merupakan suatu proses untuk pencapaian tujuan, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari sebelumnya, Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat. (Handayaniingrat S, 1994:16)

Beberapa definisi atau pengertian ”Efektivitas” menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Sondang P. Siagian “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. (Siagian P.S, 2001:24)

Kemudian Gibson menambahkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama (Gibson, 2002:284). Selanjutnya menurut pendapat Handoko, (1997:7). Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko,1997:7)

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

Berdasarkan pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.1.1 Pendekatan Efektivitas.

Berkaitan dengan pendekatan efektivitas, Lubis dan Husseini menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

- a. Pendekatan sumber (*resorce approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan organisasi internal atau mekanisme organisasi.

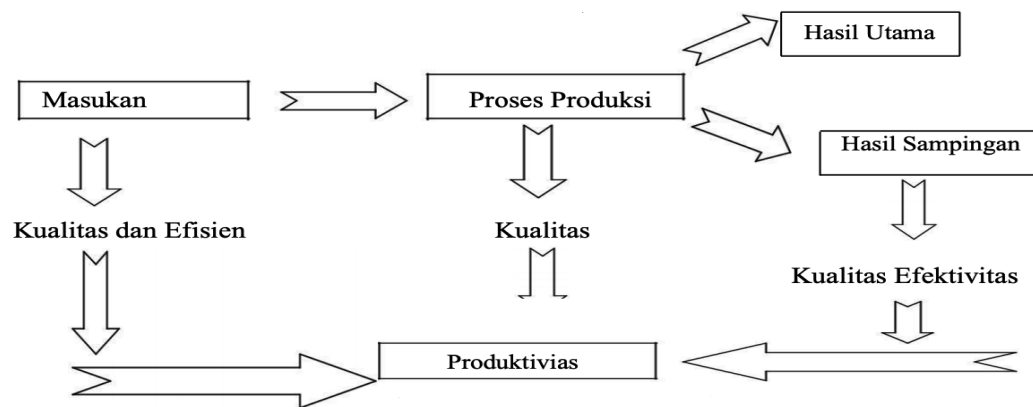
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. (Lubis dan Hussein, 1987:55).

Dari tiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas merupakan konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarannya. Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan dalam suatu program dibutuhkan ukuran efektivitas untuk mengukur keberhasilan sebuah program.

2.1.1.2. Ukuran Efektivitas.

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai atau tidaknya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dibuatnya suatu program tersebut. Berikut adalah keterkaitan antara efisiensi, efektivitas, kualitas dan produktivitas yang secara sistematis dapat digambarkan pada gambar 2.1 yaitu :

Gambar 2.1
Keterkaitan Antara Efisiensi Efektivitas, Kualitas dan Produktivitas Yang
Secara Skematis.



(Sumber : Serdamayanti 2009:60)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa keterkaitan efisiensi, efektivitas, kualitas dan produksi bahwa efisiensi dapat dikatakan sebagai ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (*input*). Efektivitas ini merupakan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai yang dapat dilihat dari kualitas yang memadai. Kualitas ini berpengaruh pada hasil yang akan dicapai. Produktivitas individu merupakan perbandingan dari efektivitas keluaran (pencapaian hasil kerja yang maksimal) dengan efisiensi salah satu masukan (tenaga kerja) yang mencakup kuantitas, kualitas dalam satuan waktu tertentu. (Serdamayanti 2009:60)

Pengertian dari input yang dimaksud di atas dapat dijelaskan bahwa dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang

berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir. Menurut Susanto dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen* bahwa input adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem (Susanto, 2007 : 23).

Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai mutu atau kualitas karena dapat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengolah input, agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat. Proses ini dapat dilakukan oleh mesin, orang atau pun komputer. Menurut pendapat Edhy Sutanta dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Manajemen* berpendapat bahwa proses adalah komponen sistem yang mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi para pemakainya (Sutanta, 2003 : 5).

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa proses merupakan peran utama dalam suatu sistem, karena dengan proses pengolahan masukan dapat menghasilkan keluaran. Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak terwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu)

dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual In Society* memberikan jabaran tentang ukuran efektivitas, dan menyebutkan ukuran efektivitas program sebagai berikut:

“The proper measure of effectiveness is productivity, effectiveness is measured by how much satisfaction is engendered, effektivieness is determined by creative outcomes, effectiveness is properly measured by such less tangible consequences as the intensity of emotional experience the individual members are helped to achieve (Krech, et.al, 1962:454)”.

Pengertian ini memberikan makna bahwa ukuran yang tepat dari efektivitas adalah produktivitas, efektivitas diukur dengan berapa banyak kepuasan yang ditimbulkan, efektivitas ditentukan oleh hasil kreatif, efektivitas diukur dengan konsekuensi kurang nyata seperti intensitas pengalaman emosional anggota individu dibantu untuk mencapainya. Sehingga pengukuran terhadap efektivitas berkaitan dengan produktivitas atau pekerjaan yang dihasilkan, derajat kepuasan, kreativitas dan intensitas.

Ukuran efektivitas bermacam-macam. Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual In Society* memberikan jabaran tentang ukuran efektivitas kelompok. yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh.
3. Produk kreatif.

4. Intensitas yang akan dicapai.
(David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey 2012:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ukuran daripada efektivitas salah satunya adalah jumlah hasil, dimana jumlah hasil tersebut dilihat dari perbandingan input dan output, dimana antara input dan output terjadi keseimbangan dalam menghasilkan kualitas dan kuantitas suatu produk. Hasil produk tersebut merupakan hasil dari proses kegiatan organisasi.

Adanya perbandingan antara input dan output, ukuran dari pada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Tingkat kepuasan yang diperoleh dalam ukuran efektivitas ini bisa di dasarkan pada kuantitatif (berdasarkan pada jumlah) suatu hasil (barang) atau etos kerja yang dihasilkan berdasarkan jumlah yang dihasilkan, dan juga ukuran efektivitas dapat dilihat berdasarkan kualitatif, artinya ukuran dari pada efektivitas berdasarkan mutu yang dihasilkan dari hasil kerja yang dicapai.

Antara input dan output akan menghasilkan sebuah hasil yang berkualitas apabila ditunjang dengan produk kreatif, artinya produk kreatif tersebut adalah penciptaan kondisi kerja yang kondusif yang nantinya akan menumbuhkan kreatifitas dan akan mendorong individu mengeluarkan kemampuannya dalam bekerja di dalam organisasi.

Setelah ukuran efektifitas juga dipengaruhi oleh intensitas yang akan dicapai, artinya setelah terciptanya suatu kondisi yang kondusif dalam lingkungan organisasi, maka akan meningkatkan ketaatan yang tinggi antar individu dalam melakukan

kegiatan organisasi, yang tanpa disadari akan meningkatkan ikatan kerja antara individu yang sangat baik. Dari pendapat di atas, kejelasan tujuan, perumusan kebijakan, serta perencanaan yang matang harus dijalankan secara benar untuk menjadi ukuran efektivitas suatu organisasi. Dilihat pula dengan penyusunan program yang tepat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan yang bersifat menididik.

Faktor-faktor tersebut di atas sangatlah penting dipenuhi demi keberhasilan suatu efektivitas. Keempat faktor tersebut saling berkesinambungan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Faktor-faktor tersebut juga menentukan tujuan organisasi yang terarah.

Dikemukakan penjelasan ukuran atau kriteria efektivitas oleh Gibson dkk yang menyebutkan indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut :

1. Produktivitas yaitu merupakan suatu kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Kualitas yaitu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
3. Efisiensi yaitu merupakan perbandingan (*ratio*) antara input dengan output.
4. Fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi.
5. Kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.
7. Pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. (Gibson dkk, 1989:34)

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata dan telah diwujudkan. Namun, jika usaha

datau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut S.P. Siagian, Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini di maksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan startegi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa startegi adalah „pada jalan“ yang diikuti dalam melalukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan yang harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu perencanaan yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksana yang tepat. Sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efesien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakit didekatkan para tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas orgaisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. (S.P. Siagian, 1978:77)

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Kejelasan staregis pencapaian tujuan, analisis proses, perencanaan, penyusunan program tersebut, dan lain-lain sangat berpengaruh besar bagi keberhasilan atau

efektivitas suatu program pada sebuah instansi atau organisasi dalam melaksanakan implementasi program tersebut.

Selanjutnya Steers mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

1. Produktivitas.
2. Kemampuan adaptasi kerja.
3. Kepuasan kerja.
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya
(Dalam Tangklisan, 2005:141).

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya, pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. (M. Steers, 1985 : 53).

Dari beberapa uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa ukuran efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal sesuai dengan tujuan dari instansi atau lembaga yang ada.

2.1.1.3 Ukuran Efektivitas Program.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait.

Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Menurut Budiani dalam bukunya efektivitas program menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini:

- a. Ketepatan Sasaran Program Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Sosialisasi Program Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
- c. Tujuan Program Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

- d. Pemantauan Program Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. (Budiani,2007:20)

Berbeda dengan pendapat Budiani, Siagian dalam S.P. Siagian mengemukakan ukuran efektivitas program meliputi:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yaitu penentuan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, yaitu strategi serta kebijakan yang ditentukan harus mampu menjembatani tujuan yang ditetapkan dengan usaha-usaha kegiatan operasional;
- d. Perencanaan yang matang, yaitu mengambil keputusan untuk kegiatan di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, yaitu berkaitan dengan pedoman untuk bertindak.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana, hal ini berguna dalam menunjang pelaksanaan program.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bila program tidak dilakukan secara efektif dan efisien maka tujuan pun tidak akan tercapai.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian, yaitu dilakukan untuk mengatur dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan program. (S.P. Siagian, 1978:77).

Kemudian menurut Kettner, Moroney dan Martin dalam bukunya *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach* Menjelaskan bahwa terdapat kriteria penilaian apakah suatu program efektif atau tidak , yaitu:

- 1. *Effort*
Effort(output) data provide feedback on the amount of product and services (intermediate outputs) provided, the amount of quality product and services (quality outputs) provided, and the number service complementions (final outputs) achieved.
- 2. *Cost – Efficiency*
Cost – Efficiency data provide a feedback on the costs of providing program products and services, including intermediate outputs, quality outputs, and final outputs (service completions). Cost efficiency date are

developed by computing costs per output : intermediate, quality, and final.

3. *Result.*

Result (outcome) data provide feedback on the extent to which a program achieves its intended result (outcome), both intermediate and final. Result (outcome) data can be monitored during implementation to compare actual result achieved with planned result.

4. *Cost – Effectiveness*

Cost – Effectiveness data provide feedback on the cost of achieving program result (outcome), both intermediate and final. Cost effectiveness data are developed by computing cost per intermediate outcome and per final outcome.

5. *Impact*

Impact data provide feedback on the most difficult assessment question of all : what happened to clients as a result of participation in a program that would not have happened in the program's absence? To address this question, impact data are usually generated using social science research techniques, including the creation of a control group for comparison purposes and the use of statistics to measure the magnitude of the impact. (Kettner, Moroney dan Martin, 2008:262)

Seperti namanya, "upaya" didefinisikan sebagai jumlah pekerjaan, atau jumlah unit kerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Secara sederhana, upaya ini adalah jumlah jam yang dihabiskan pekerja, fokus pada tugas tertentu, untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jika Anda ingin menentukan dua lainnya, Anda harus terlebih dahulu menentukan upaya dalam suatu proyek. Upaya paling sering dinyatakan dalam jam staf, hari, atau minggu. (Kettner, Moroney, dan Martin, 2008:256).

Efisiensi biaya adalah memberikan umpan balik tentang biaya penyediaan produk dan layanan program, termasuk output antara, output kualitas, dan output akhir (penyelesaian layanan). Data efisiensi biaya dikembangkan dengan menghitung biaya per keluaran: menengah, kualitas, dan final. Selama implementasi, data biaya aktual

dapat dibandingkan dengan biaya yang direncanakan (pemantauan). Pada akhir tahun program, data efisiensi biaya dapat digunakan untuk menilai produktivitas program dan juga diperlukan untuk tujuan pelaporan pengukuran kinerja. (Kettner, Moroney, dan Martin, 2008:256).

Data Hasil (hasil) memberikan umpan balik tentang sejauh mana suatu program mencapai hasil yang diinginkan (hasil), baik menengah dan final. Hasil data dapat dipantau selama implementasi untuk membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan. Digunakan pada akhir tahun program, hasil (hasil) dokumen data untuk tujuan kebijakan dan perencanaan hasil yang dicapai oleh suatu program. Data hasil (hasil) juga diperlukan untuk keperluan pelaporan pengukuran kinerja. Akhirnya, data hasil (outcome) digunakan dalam menentukan efektivitas biaya program. (Kettner, Moroney, dan Martin, 2008:256).

Efektivitas Biaya memberikan umpan balik mengenai biaya untuk mencapai hasil program (hasil), baik menengah maupun final. Data efektivitas biaya dikembangkan dengan menghitung biaya per hasil antara dan biaya per hasil akhir. Data efektivitas biaya biasanya hanya tersedia pada akhir tahun program (evaluasi program) dan digunakan untuk mendokumentasikan biaya pencapaian hasil (hasil) untuk tujuan kebijakan dan perencanaan dan untuk tujuan pelaporan pengukuran kinerja. (Kettner, Moroney, dan Martin, 2008:256).

Data Dampak memberikan umpan balik pada pertanyaan penilaian paling sulit dari semua: Apa yang terjadi pada klien sebagai hasil dari partisipasi dalam program yang tidak akan terjadi jika tidak ada program? Untuk menjawab pertanyaan ini, data

dampak biasanya dihasilkan dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial, termasuk pembentukan kelompok kontrol untuk tujuan perbandingan dan penggunaan statistik untuk mengukur besarnya dampak. Pengembangan data dampak sangat sulit dilakukan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya program dan lembaga menjadikannya penting bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin. Data dampak dapat memberi administrator layanan sosial informasi berbasis ilmu sosial keras yang menunjukkan sejauh mana suatu program mencapai dampak yang terukur dengan kliennya. (Kettner, Moroney, dan Martin, 2008:256).

Untuk mengolah jenis data penilaian Efektivitas Program dari *Effort* (Upaya), *Cost-Efficiency* (Efisiensi Biaya), *Result* (Hasil), *Cost –Effectiveness* (Efektivitas Biaya) dan *Impact* (Dampak). diperlukannya Tiga indikator diantaranya Pengukuran Kinerja, Pemantauan, dan Evaluasi Program. Seperti diilustrasikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1

Pengukuran Kinerja, Pemantauan, Evaluasi Program, dan Jenis Data Program

Jenis Data Penilaian	Pengukuran Kinerja	Pemantauan	Evalusi Program
<i>Effort</i>	X	X	
<i>Cost- Efficiency</i>	X	X	
<i>Resluts</i>	X	X	X
<i>Cost - effectiveness</i>	X	X	X
<i>Impact</i>	X		X

(Sumber : Kettner, Moroney, dan Martin, 2008:256)

Tumpang tindih dalam hal jenis data program mengarah ke pengamatan penting: Untuk sebagian besar, perbedaan antara pengukuran kinerja, pemantauan, dan evaluasi program tidak begitu banyak perbedaan dalam jenis data program yang

digunakan sebagai perbedaan dalam kapan dan bagaimana data program digunakan. Pengukuran kinerja menggunakan data program untuk keperluan pelaporan eksternal. Pemantauan menggunakan data program selama implementasi untuk tujuan manajemen. Evaluasi program menggunakan data program setelah implementasi untuk tujuan kebijakan dan perencanaan.

Perlu diketahui bahwa pengukuran kinerja Program hanya berkaitan dengan pengumpulan dan pelaporan data dan informasi kinerja. Pengukuran kinerja tidak terkait dengan pertanyaan seperti, Apakah program dilaksanakan sesuai rencana? Apakah program mencapai hasil yang diinginkan? Dan apa dampak program? Untuk umpan balik yang membahas jenis pertanyaan ini, lembaga layanan sosial harus beralih ke pemantauan dan evaluasi program.

2.1.2 Pengertian Organisasi Pemerintahan.

Organisasi memiliki beberapa definisi yang berbeda, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya sangat beragam. Mahsun menjelaskan bahwa: “Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama”. (Mahsun, 2006:1) Pendapat diatas menjelaskan bahwa sekumpulan orang yang saling bekerjasama secara terstruktur dalam menjalankan proses kerjasama untuk dapat mencapai sebuah tujuan dari kelompoknya tersebut.

Selain itu, Sulistiyani (2009:41) menjelaskan definisi organisasi dengan mengklasifikasikan definisi organisasi menjadi tiga yaitu:

1. Organisasi dipandang sebagai sekumpulan orang
2. Organisasi dipandang sebagai proses pembagian kerja
3. Organisasi dipandang sebagai sistem

Pendapat diatas menjelaskan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah sekelompok orang yang memiliki sebuah sistem dan proses pembagian kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut.

Dari beberapa definisi organisasi diatas, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi dan terstruktur sesuai pembagian kerjanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Karniawati, N. Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan. (Karniawati,N, 2015:208)

Berkaitan dengan organisasi pemerintah, Alfred Kuhn dalam buku Simangunsong yang berjudul Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa menjadi

Kelurahan mengemukakan adanya enam asumsi yang dapat digunakan untuk memahaminya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah organisasi formal yang kompleks;
2. Pemerintah melingkupi seluruh masyarakat;
3. Pemerintah secara potensial mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas dalam menentukan perihal keputusan dan pengaruh yang ditimbulkannya;
4. Afiliasi keanggotaan oleh individu (warga negara) diakui secara otomatis melalui kelahiran dan diakhiri karena kematian;
5. Pemerintah menjalankan monopoli dalam penggunaan kekuasaan atau delegasi atasnya;
6. Terdapat banyak pendukung pemerintah yang mempunyai tujuan bertentangan sehingga harus dipenuhi oleh kegiatan pemerintah dan memberikan setiap kepentingan yang berbeda dengan cara pemecahan yang berbeda pula, apabila berbagai konflik tidak dapat diatasi melalui komunikasi dan transaksi. (Simangunsong, 2014:82)

Dengan adanya perubahan sistem politik pemerintahan Indonesia pada masa reformasi mengenai pemerintahan daerah, melalui Undang-Undang Nomor 5 30 tahun 1974 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diganti kembali oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan kini Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Maka dari itu perubahan sistem pemerintahan daerah yang awalnya sentralistis menjadi sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan otonomi daerah kepada setiap daerah yang berada di Indonesia. Seiring dengan perubahan sistem desentralisasi, karakteristik organisasi pemerintah daerahnya pun mengalami sebuah perubahan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Diberi peluang untuk menyusun organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing;
2. Ada kaitan langsung antara visi dan misi dengan bentuk serta susunan organisasi;
3. Diarahkan untuk memiliki ukuran kinerja yang jelas dan terukur ;

4. Fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, sehingga unsur pelaksana (teknis maupun kewilayahan) memperoleh perhatian yang lebih besar baik dari segi kewenangan, dana personil, maupun logistik;
5. Orientasi mulai bergeser dari struktural ke arah fungsional dan basis kewenangan kepada basis kompetensi;
6. Sistem hirarki menjadi lebih longgar, rentan kendali menjadi tidak beraturan, sehingga pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil secara struktural menjadi tidak pasti. (Simangunsong, 2014:84)

Ciri-ciri pemerintah diatas dapat dipahami bahwa organisasi pemerintah daerah pada era reformasi kini mempunyai sebuah kewenangan secara luas sesuai kebutuhan pada daerahnya masing-masing. Dengan orientasi dari struktural menjadi fungsional dengan basis sebuah kompetensi.

2.1.3 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada beberapa negara dan aspek lainnya. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan menurut Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008 definisi UMKM, yaitu:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Scarborough dan Zimmerer sebagaimana di kutip oleh Ernani Hardiyati dalam buku usaha mikro kecil dan menengah menyatakan bahwa pemulihan krisis ekonomi berjalan selama tujuh tahun dan beberapa studi telah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan peranan usaha besar, tetapi UMKM terbukti mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha skala lebih besar. Tidak mengherankan bahwa baik pada masa krisis dan masa pemulihan perekonomian Indonesia saat ini, UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting ditinjau dari berbagai aspek diantaranya:

1. Jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.
2. Potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha dengan skala lebih besar.
3. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan. Keempat, memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil. (Scarborough dan Zimmerer, 2011:8)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur ekonomi perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuh dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat dijelaskan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM yaitu untuk mewujudkan pemerataan perekonomian secara seimbang, berkembang, dan berkeadilan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Melalui perwujudan peningkatan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri pada masing-masing daerah sebagai pencipta lapangan kerja dan bermuara pada sebuah kesejahteraan bangsa Indonesia.

Menurut Tulus Tambunan dalam buku usaha mikro, kecil, dan menengah sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar yakni sebagai berikut :

- 1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK).
- 2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan

nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.

3. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama UMI (Usaha Mikro), di Negara sedang berkembang berlokasi pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian.
4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di Negara Berkembang, yakni sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta sumber daya manusia atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.
5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis yang besar pada tahun 1997-1998. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar.
6. Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi.
7. Terbukti pada umumnya, pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat atau dari pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen.
8. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bambu, dan rotan.
9. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi.
10. Seperti sering dikatakan dalam literature, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap persaingan (UB). (Tambunan, 2009:2-4)

UMKM tidak saja berbeda dengan UB (Usaha Besar), tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara UMI (Usaha Mikro) dengan UK (Usaha Kecil) dan UM (Usaha Menengah) dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara yang sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Aspek-aspek ini termasuk orientasi pasar, profil, dan pemilik usaha, sifat

dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan-bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah:

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis
5. Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.

2.1.3.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kriteria dan karakteristik tersendiri yang dapat membedakan dengan Usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM dengan Usaha berskala besar adalah dari segi Permodalan dan Sumber Daya Manusianya. UMKM umumnya memerlukan modal relatif kecil dengan usaha berskala besar. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Undang-

Undang No 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha seperti dijelaskan dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2

Kriteria Usaha, Mikro Kecil dan Menengah.

NO	USAHA	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

(Sumber : Kementria Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012)

Dapat dilihat Pada tabel 2.1 merupakan kriteria Asset dan Menengah Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut, kriteria Usah Mikro, Kecil dan Menengah dapat dijelaskan pada pasal 6 UU No 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

- (1) Kriteria Usah Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000. (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000. (Lima Puluh Milyar Rupiah)

Di dalam beberapa Negara, kriteria dan definisi UMKM terdapat perbedaan sesuai dengan karakteristik Negara tersebut. Definisi tersebut prinsipnya didasarkan pada aspek-aspek : Jumlah Tenaga Kerja, Pendapatan, Jumlah Aset. Dibawah ini beberapa kriteria UMKM di Negara-negara atau lembaga asing :

1. World Bank, membagi UMKM kedalam 3 jenis yaitu :
 - 1.1 Medium Enterprise dengan kriteria :
 - a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 - b. Pendapatan setahun hingga sejumlah \$15 juta
 - c. Jumlah aset hingga sejumlah \$15 juta
 - 1.2 Small Enterprise dengan kriteria :
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$3 juta
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$3 juta
 - 1.3 Micro Enterprise dengan kriteria :
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$100 ribu
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$100 ribu
2. Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap dibawah SG\$ 15 juta (sebanding dengan US\$ 8,7 juta) untuk perusahaan jasa, jumlah karyawannya minimal 200 orang
3. Malaysia menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker kurang dari 75 orang atau modal pemegang sahamnya kurang dari M \$ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua yaitu :
 - 3.1 Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5–50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu
 - 3.2 Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50–75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu – M \$ 2,5 juta.
4. Jepang, membagi UMKM sebagai berikut :
 - 4.1 Mining and manufacturing, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US\$ 2,5 juta.
 - 4.2 Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 840 ribu
 - 4.3 Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 820 ribu
 - 4.4 Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 420 ribu

5. Korea selatan mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlahnya dibawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari US\$ 60 juta
6. European Commision, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
 - 5.1 Medium-sized Enterprise dengan kriteria :
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$50 juta
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$50 juta
 - 5.2 Small-sized Enterprise dengan kriteria :
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$10 juta
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$13 juta
 - 5.3 Micro-sized Enterprise dengan kriteria :
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$2 juta
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$2 juta

2.1.3.2 Faktor Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi perhatian bagi para ilmuan dan praktisi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan perusahaan yang lebih besar, UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dan oleh karenanya memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Menurut Forsman Karakteristik UMKM pada umumnya memiliki keterbatasan sumber dana, manajemen, dan bergantung dengan sebagian kecil pelanggan (Forsman,2008:606). Disamping itu, UMKM juga memerlukan karyawan yang multiskill. Hanif dan Manarvi menyarankan agar UMKM terus melakukan peningkatan baik dalam proses produksi, kualitas produk, dan pelayanan agar mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Inovasi menjadi kunci utama. (Hanif dan Manarvi 2009:65)

Sementara itu, Forsman telah mengembangkan beberapa dimensi kesuksesan usaha kecil dan menengah yang dapat dijadikan dasar pengembangan bisnis UMKM. Beberapa dimensi tersebut antara lain dimensi kewirausahaan, manajemen proyek, dan perubahan organisasi (Forsman, 2008:610). Dimensi-dimensi ini diyakini dapat meningkatkan daya saing UMKM. Selain itu, pengembangan UMKM diupayakan untuk mengedepankan aspek inovasi dan orientasi pasar (Frans et al., 2004), dengan memperhatikan aspek fleksibilitas dan kecepatan respon terhadap permintaan pasar (Rahab, 2012:97).

Konsep pengembangan bisnis yang dikembangkan oleh Forsman untuk usaha kecil dan menengah bahwa dimensi kewirausahaan memainkan peranan yang sangat penting dalam keberhasilan UMKM. Minat berwirausaha yang kuat akan menghasilkan inovasi produk yang orisinal dan berorientasi pada kebutuhan konsumen (Forsman, 2008:606 & Frans et al., 2004:).

Sementara itu, Storen berpendapat bahwa Minat berwirausaha juga ditentukan oleh dasar pendidikan. Menurut hasil penelitiannya, lulusan perguruan tinggi memiliki niat yang kuat untuk berwirausaha jika mereka mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada masa studinya. Penelitian Subandono (2007), Minat Wirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. (Storen, 2014:716)

Menurut Rehman and Ibrahim, Promosi merupakan indikator yang signifikan dalam kemajuan usaha. Penggunaan elemen-elemen promosi seperti iklan, promosi

penjualan, tenaga penjualan, dan hubungan masyarakat diyakini mampu meningkatkan kinerja penjualan sebagai bagian dari program pemasaran terintegrasi. (Rehman and Ibrahim, 2011:187)

Menurut Kotler and Keller, Branding adalah bagian penting dalam kegiatan pemasaran. Merek adalah nama, istilah, tanda, symbol, atau desain, atau kombinasi dari kesemuanya yang bertujuan untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa dan akhirnya dapat membedakan diri sendiri dengan yang lainnya. (Kotler and Keller 2016:104)

Horan berpendapat bahwa membangun merek (branding) diperlukan oleh usaha kecil dan menengah untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan, diferensiasi, dan meningkatkan pertumbuhan usaha. Lebih lanjut, branding pada usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang jasa, menurut Horan, harus disesuaikan dengan karakteristik UKM. Selain itu, UKM juga perlu memperhatikan pentingnya peran konsumen, peran manajemen, dan ekuitas merek. (Horan, 2011:114)

Menurut Lamprinopoulou, menunjukkan bahwa Jaringan antar usaha kecil menengah dan rantai pemasok berperan signifikan terhadap kinerja UKM dalam kluster yang sama. Faktor penting lainnya adalah jaringan dengan perusahaan lain di luar kluster karena memungkinkan UKM untuk meningkatkan pengetahuan bisnis dari pihak eksternal. (Lamprinopoulou, 2011:241)

2.2 Kerangka Pemikiran.

Seiring dengan pertumbuhan UMKM yang begitu tinggi maka akan berdampak dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan daya saing, produktifitas dan pemberdayaan potensi UMKM seharusnya merupakan gerakan bersama antar berbagai pihak, namun pemerintah memegang peranan terbesar dalam upaya tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Dalam rangka menciptakan pembangunan nasional sebagai daerah otonomi dengan seluruh keragaman yang dimilikinya, Kota Bandung merupakan salah satu pusat kegiatan nasional sebagai kawasan dengan sektor unggulan UMKM, Industri, Jasa dan Pariwisata. Potensi industri kecil dan menengah yang berada di Kota Bandung memiliki jumlah yang cukup signifikan dibandingkan potensi industri besar. Dengan sebuah potensi masyarakat yang cukup kreatif, Kota Bandung menjadi sebuah panutan bagi kota lainnya dalam mengembangkan dan memajukan potensi UMKM yang dimiliki pada setiap kota di Indonesia.

Kota Bandung dapat dikatakan menjadi leader atau gudang para pelaku UMKM dan Industri kreatif di Indonesia. Memang bisa diakui bahwa pelaku bisnis UMKM Kota Bandung dapat menginspirasi berbagai orang dengan kreatifitas yang dihasilkannya. Beberapa hal yang menarik di Kota Bandung adalah trend *fashionnya*, menawarkan model desain yang menarik kain, mukena, dan baju muslim dengan harga jual yang murah.

Namun besarnya potensi UMKM Kota Bandung untuk bersaing tidak membuat UMKM terlepas dari permasalahan usaha yang mereka hadapi, dalam jurnal yang ditulis oleh Hartono & Hartomo (2014) mengatakan UMKM di Indonesia masih memiliki permasalahan seperti: Dari permasalahan diatas Salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh UMKM di Indonesia adalah masalah pemasaran yang dirasakan oleh 30,6 persen UMKM (Badan Pusat Statistik, 2013).

Pelaku UMKM Kota Bandung juga mengalami permasalahan pemasaran.. Menurut ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bandung, UMKM banyak yang masih terkendala dengan pemasaran, sebab para pelaku usaha belum bisa memasarkan produk dengan maksimal (Andri Juwandi dalam Fauzi, 2017).

Melihat dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM untuk bersaing dengan industri asing, hal tersebut merupakan salah satu tugas Pemerintah, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 tahun 2009 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 18 yaitu menciptakan iklim usaha kondusif dengan memberikan kemudahan fasilitas. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya dalam hal Pemasaran, Pemerintah Kota Bandung berinisiatif membuat Program Promosi UMKM yaitu *Little Bandung* yang diresmikan Oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan pemasaran para pelaku UMKM kota Bandung.

Little Bandung adalah Program yang didirikan pemerintah Kota Bandung di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk mempromosikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memperkuat daya saing produk Bandung

agar dapat berbisnis diluar negeri, meningkatkan dan mengembangkan ekspor produk UKM Kota Bandung supaya dapat berkontribusi terhadap perekonomian negara. Pada Tahun 2016 Kota Bandung mengalami peningkatan wisatawan terutama dari Malaysia terhitung pada September 2016 mencapai 10.020 orang (Suhendra,2016, Tirto.id). di Tahun 2017 yang mencapai 10.524 orang (Budhiman 2018) Tahun 2017 yang mencapai 10.524 orang (Budhiman,2018, bandung.bisnis.com). dan Tahun 2018 mencapai 9.809 orang (Budianto,2019. Jabar.sindonews.com).

Melonjaknya wisatawan Malaysia ke Kota Bandung ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti harga penerbangan yang murah dari Malaysia ke Kota Bandung. Kemudian dalam bidang *fashion*, Pasar Baru Trade Center Bandung menawarkan model desain yang menarik kain, mukena, dan baju muslim dengan harga jual yang murah, serta akses yang mudah dari bandara untuk mencapai tempat tujuan. Tingginya minat penduduk Malaysia terhadap produk UMKM Kota Bandung, maka Walikota Bandung Mohammad Ridwan Kamil memutuskan untuk membangun *Little Bandung Store* dan *Little Bandung Wall* di Petaling Jaya – Malaysia.

Pada tanggal 4 Oktober 2016 Ridwan Kamil meresmikan *Little Bandung Store* di Paragdim Mall, Petaling Jaya- Malaysia. Peresmian *Little Bandung Store* di Petaling Jaya – Malaysia setelah terjalinnya Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Petaling Jaya – Malaysia di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Pemerintah Petaling Jaya memberikan Fasilitas pembukaan Program Promosi UMKM *Little Bandung Store*. Dengan adanya Program *Little Bandung Store* di Petaling Jaya,

Kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan pemasaran dan ekspor dari produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bandung.

Untuk mengukur Efektivitas Program *Little Bandung Store* di Petaling jaya – Malaysia dalam mempromosikan dan memasarkan produk UMKM asal Bandung, menurut Kettner, Moroney dan Martin menjelaskan bahwa terdapat lima kriteria penilaian dalam mengukur efektivitas program , yaitu *Effort* (Upaya), *Cost-Efficiency* (Efisiensi Biaya), *Result* (Hasil), *Cost –Effectiveness* (Efektivitas Biaya) dan *Impact* (Dampak). (Kettner, Moroney dan Martin, 2008:260)

Effort (Upaya), Merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selama pelaksanaan program, upaya yang telah dilakukan ini dibandingkan dengan upaya yang direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan oleh Peserta Program *Little Bandung Store* dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam mencapai tujuan Program Promosi UMKM *Little Bandung Store* di Petaling Jaya - Malaysia Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung diantaranya melalui koordinasi dan juga kerjasama pemerintah petaling jaya - malayasia dengan dinas lain atau pihak tertentu dalam melaksanakan program tersebut dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun upaya tersebut belum dilaksanakan dengan baik karena Biaya anggran yang terbatas.

Cost-Efficiency (Efisiensi Biaya) Merupakan biaya minimum yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk melaksanakan Program *Little Bandung Khususnya Little Bandung Store* di Petaling Jaya - Malaysia

Oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bandung secara berkualitas. Dalam penelitian ini, efisien biaya yang dikeluarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam melaksanakan program *Little Bandung Store* di Petaling Jaya – Malaysia ini diukur dari tersedianya dana untuk menyelenggarakan program dan terserapnya semua dana yang sudah disediakan dan direncanakan secara optimal.

Result (Hasil) Merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program *Little Bandung Store* di Petaling Jaya - Malaysia, sejauh mana program dapat mencapai hasil yang diinginkan. Hasil ini dapat dipantau selama pelaksana program dan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Program *Little Bandung Store* Di Petaling Jaya - Malaysia Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Dalam penelitian ini, maka hasil yang diharapkan dari adanya program ini yaitu memperluas akses pemasaran, meningkatkan akses pemasaran dan meningkatkan penjualan produk UMKM Kota Bandung. dan menjadikan Kota Bandung sebagai tempat pariwisata serta mengembangkan destinasi wisata yang paling diminati oleh masyarakat kota dimana *Little Bandung* berada termasuk *Little Bandung Store* di Petaling Jaya - Malaysia.

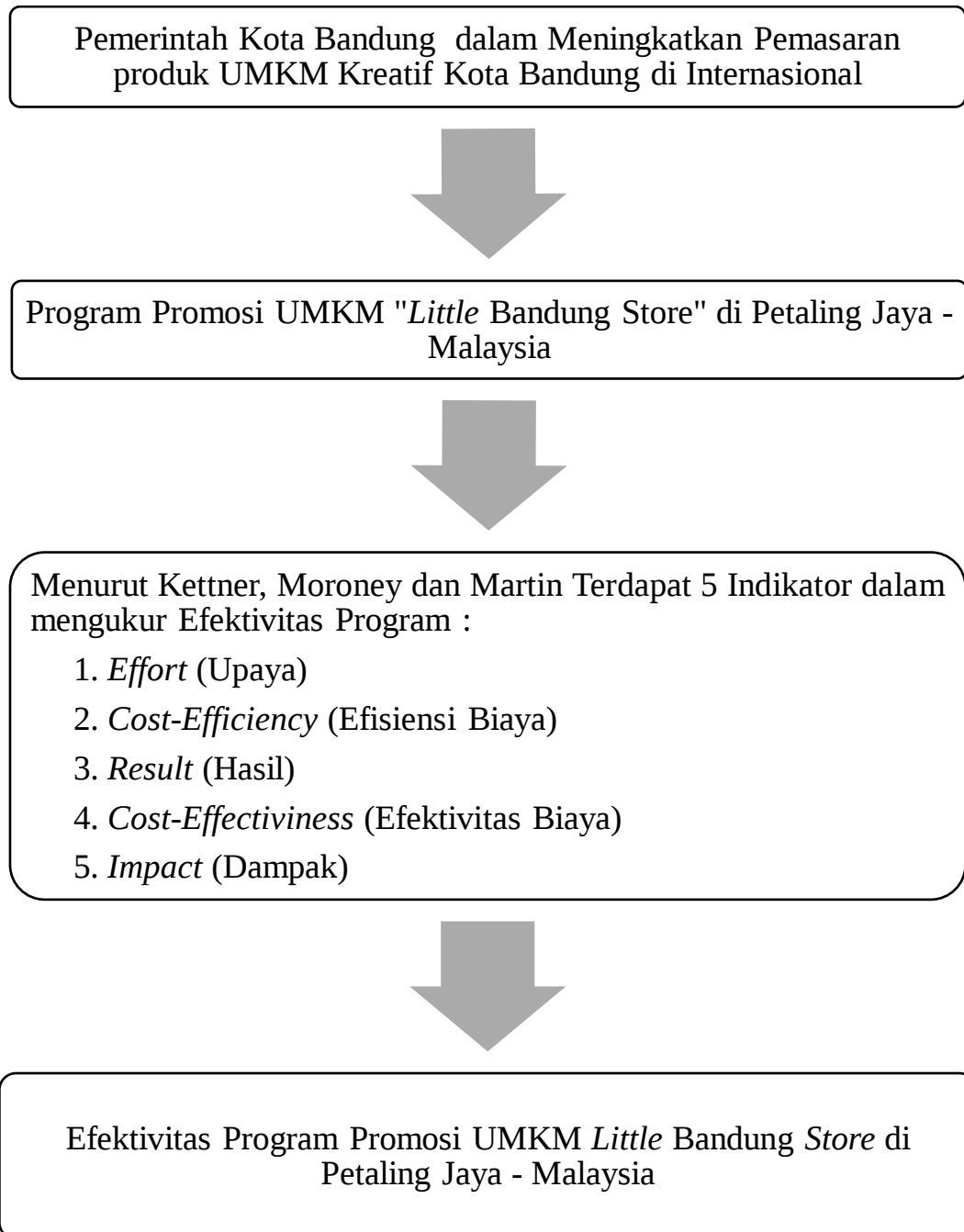
Cost – Effectiveness (Efektivitas Biaya) Efektivitas biaya ini mendeskripsikan berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program yang telah diterapkan. Dalam penelitian ini, maka besaran biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk mencapai tujuan Program *Little Bandung Store* di Petaling Jaya - Malaysia Oleh Dinas Pedagangan dan Perindustrian

Kota Bandung dilihat dari tercapainya semua hasil yang diharapkan dengan menggunakan dana yang telah disediakan atau direncanakan.

Impact (Dampak) Merupakan dampak yang dirasakan setelah adanya Program *Little Bandung* Khususnya program *Little Bandung Store* di Petaling Jaya - Malaysia dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, baik sebelum ada program maupun setelah terlaksananya program. Dalam penelitian ini, dampak yang dirasakan adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan Ekspor produk UMKM Kota Bandung di internasional termasuk di Negara Malaysia dan meningkatkan perekonomian Kota Bandung. Agar kerangka berpikir diatas dapat lebih jelas dan lebih mudah dipahami, peneliti mencoba menggambarkan kerangka berpikir kedalam gambar dibawah ini:

Bagan 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber : (Hasil Olah Peneliti 2020)

2.3. Proposisi.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas maka proposisi penelitian ini adalah Efektivitas Program Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) *Little Bandung* Dalam Meningkatkan Pemasaran Industri Kreatif Kota Bandung (Studi Kasus *Little Bandung Store* di Petaling jaya – Malaysia) dapat ditinjau dari, *Effort* (Upaya), *Cost-Efficiency* (Efisiensi Biaya), *Result* (Hasil), *Cost-Effectiveness* (Efektivitas Biaya) dan *Impact* (Dampak